

DAFTAR BACAAN

Buku

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia-UI Press, 2010.

Suyanto, Metode Penelitian Hukum, Gresik: Unigres, 2022.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Jurnal

Alexander L. Cahyadi, Keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, 8(8), 2019.

Arief Heryogi, Masruchin Ruba'I, dan Bambang Sugiri, Fungsi bukti elektronik dalam hukum acara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, *JIPPK*, 2(1), 2017.

Bunadi Hidayat, Keabsahan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, *MMH*. 40(1), 2011.

Enan Sugiarto, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata, *Rechtidee*, 11(1), 2016.

- Erma Lisnawati, Keabsahan alat bukti elektronik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 dalam perspektif criminal justice system, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 2016.
- Gerry Tambaani, Keabsahan alat bukti elektronik di tinjau dari Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, 7(4), 2018.
- I Nengah Ariana, Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, *Unes Law Review*, 5(1), 2022.
- Muhammad I. Tarigan, Alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia, *Jurnal Ius Civile*.
- Ricky V. T. Jaya dan R. Rahaditya S.H., M.H, Keabsahan alat bukti elektronik berupa rekaman dalam proses pembuktian di dalam penegakan hukum pidana (studi kasus putusan nomor: 661/PID.B/2016/PN.BLB), *Jurnal Hukum Adigama*, 3(2), 2020.